

PENCEGAHAN TERORISME DI INDONESIA

“KEMISKINAN STRUKTURAL DAN KETIMPANGAN:

Rumput Kering Radikalisme”

Oleh Ahmad Ma'ruf

Terorisme memiliki akar permasalahan yang kompleks. Terorisme bisa muncul, berkembang, dan dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan tidak mengenal kelompok agama tertentu. Ideologi radikalisme yang menjadi ruh terorisme akan mudah tumbuh tatkala hinggap pada person-person yang kondisi dasar kehidupan sosial ekonominya yang rentan. Salah satu kondisi sosial ekonomi yang rentan adalah Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan (KSK).

Tentu saja, terorisme dan radikalisme tidak serta merta muncul pada komunitas ataupun person KSK, namun banyak pemantik lain. Kepentingan politik lokal-nasional-internasional dan perebutan akses sumber daya juga menjadi sumber berkembangnya terorisme dan radikalisme. Dalam konteks ini, radikalisme dan terorisme untuk bukan secara alami tumbuh tapi ditumbuhkan dan atau dikondisikan berkembang.

KSK memiliki tautan erat dengan aspek edukasi, akses sumber daya, dan psikososial. Pada level global, KSK banyak dijumpai pada negara-negara yang berkategori negara miskin (*less development country/LDC*) dan negara berkembang. Dalam konteks lokal, KSK banyak ditemui pada daerah-daerah yang minim pengolahan sumberdaya alam, daerah dengan akses terbatas, daerah yang kondisi demografinya memiliki tingkat kelahiran tinggi namun tingkat pendapatan rendah, dan daerah yang status kualitas hidup penduduknya (*human development index/HDI*) rendah.

Pada banyak kasus di Indonesia, person-person yang menjadi korban jaringan terorisme adalah person-person yang mayoritas berlatarbelakang kondisi sosial ekonominya berkategori rendah. Kondisi tersebut, tidak serta merta muncul karena faktor internal keluarga, namun juga karena konstruksi sosial, termasuk ketidakmerataan akses sumberdaya.

Catatan: Perlu lebih mendalam digali pemantik dasar dari person-person yang terlibat dan atau menjadi korban jaringan teroris di Indonesia, sehingga diketahui kedalaman dan besarnya tension dari dimensi-dimensi yang mendorong aksi teror, termasuk dimensi KSK ini.

Penulis meyakini, faktor KSK menjadi endemi terorisme dan radikalisme di Indonesia yang beririsan dengan dimensi sosial lainnya seperti pendidikan,

psikososial, dan kepentingan kelompok. Dalam perspektif ekonomi, KSK dapat diperbaiki dengan berbagai kebijakan pada level makro maupun mikro.

Kebijakan makro untuk memperbaiki KSK antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur pembangunan ekonomi dan sosial pada kawasan dan atau daerah yang selama ini menjadi basis tumbuh person-person yang terlibat jaringan terorisme.
2. Kebijakan fiskal pusat maupun daerah yang berupa pemusatan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sudah banyak dirumsukan, namun tumpul dalam eksekusi karena kendala fiskal.
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (*growth poll*) pada daerah-daerah miskin melalui perbaikan akses, penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi dan pendidikan yang memadahi.
4. Evaluasi atas kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah pusat maupun daerah yang berpotensi menciptakan ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah.

Kebijakan mikro untuk memperbaiki KSK antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat multi dimensi yang berkelanjutan pada kelompok rentan di daerah yang menjadi basis tumbuh person-person yang terlibat jaringan terorisme. Pemberdayaan difokuskan pada a) peningkatan pendapatan rumah tangga, b) peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, dan c) peningkatan pada inklusi sosial.
2. Perluasan akses ekonomi dan sosial pada kelompok rentan di daerah yang menjadi basis tumbuh person-person yang terlibat jaringan terorisme. Akses ekonomi yang utama pada sumber-sumber pendapatan rumah tangga, akses pasar produk, akses permodalan, dan akses sosial sehingga terbangun relasi sosial yang inklusif.

Penulis: Dosen Prodi Ilmu Ekonomi UMY, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, peneliti INSPECT, dan pengurus ICMI DIY. Catatan: tulisan ini atas nama pribadi dan tidak mewakili lembaga.